

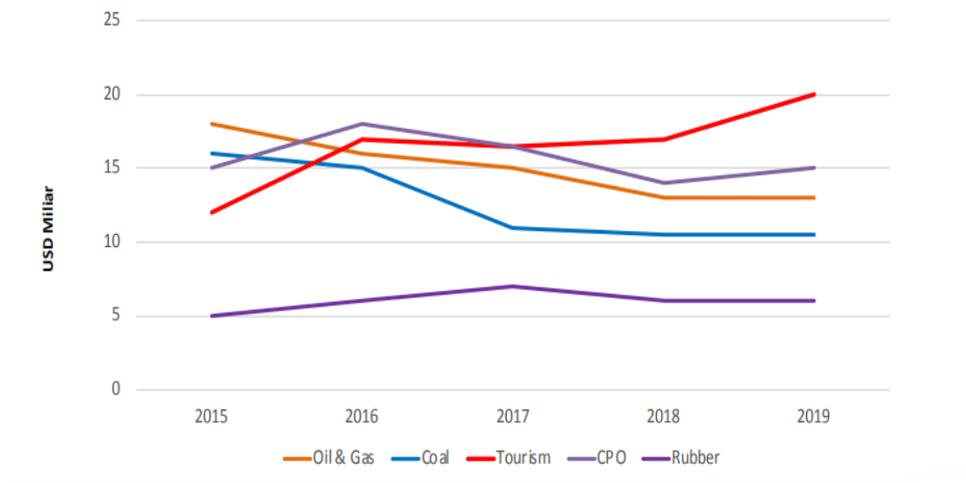
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2018 pemerintah menetapkan tiga sektor unggulan pembangunan salah satunya yakni sektor pariwisata. Keseriusan pemerintah dalam membangun sektor pariwisata Indonesia di dukung dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menetapkan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan. “*Pariwisata saya tetapkan sebagai leading sector. Pariwisata dijadikan leading sector ini adalah kabar gembira dan seluruh kementerian lainnya wajib mendukung dan itu saya tetapkan*” (Rapat Terbatas dalam Strategi Pengembangan Kepariwisata Indonesia [pdf]). Keberadaan wisatawan di suatu tujuan wisata memiliki pengaruh yang sangat besar salah satunya dalam bidang perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata. Tidak hanya meningkatkan penerimaan devisa negara, pendapatan nasional penerimaan pajak, tetapi sekaligus akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara (Yoeti, 2008: 77).

Indonesia memiliki peluang yang strategis pada sektor pariwisata mengingat sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar selain itu juga memiliki luas wilayah serta keragaman yang ada di tanah air. Dari sumber daya inilah dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk menarik minat wisatawan baik dalam maupun mancanegara. Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya menjelaskan jika kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Agustus 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 25,68% yang berpotensi menyumbang penerimaan devisa hingga 25,68% dari posisi US\$13,57 miliar pada tahun 2016 menjadi US\$17,05 miliar sampai akhir 2017 ([https:// www.cnnindonesia.com /ekonomi/2017 1018180443 -78-249279/kemenpar-klaim-pari wisata-jadi-kontribu tor-utama-devisa/](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171018180443-78-249279/kemenpar-klaim-pariwisata-jadi-kontributor-utama-devisa/) diakses 15 Februari 2018). Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut berbanding lurus dengan penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata yang juga terus mengalami kenaikan.



Gambar 1. Grafik Peningkatan Devisa Sektor Pariwisata

Sumber: Puslitbang Kemenpar 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang tinggi bagi perekonomian Indonesia dimana dari tahun 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2015 meningkat dari 12,2 miliar USD menjadi 13,6 miliar USD pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 15 miliar USD pada 2017 dan pada tahun 2018 ditargetkan menyumbang sebesar 17 miliar USD. Pada 2019 penerimaan sektor pariwisata dibidik mencapai 20 miliar USD mengalahkan sektor lainnya.

Peningkatan di sektor pariwisata nasional diikuti dengan peningkatan sektor pariwisata di Jawa Timur. Menurut data Disbudpar Provinsi Jawa Timur (2018), jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Timur selama tahun 2017 sebanyak 65.623.535 wisatawan. Mengalami kenaikan sebesar 13,01% dari tahun 2016 yang berjumlah 58.068.493 wisatawan. Sedangkan kunjungan wisnus sampai pada triwulan 2 tahun 2018 mencapai 15.681.166 wisatawan. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur selama tahun 2017 mencapai 690.509 wisatawan, meningkat 11,62% dari tahun 2016 sejumlah 618.615 wisatawan. Sedangkan kunjungan wisman sampai triwulan 2 tahun 2018 mencapai 53.608 wisatawan.

Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang besar mengingat keanekaragaman desinasi wisata yang ada. Berdasarkan Ripparprov Jawa Timur, kebijakan

pengembangan pariwisata Jawa Timur yang didasarkan pada penekanan jenis obyek wisata yang diunggulkan dibagi menjadi empat kawasan, yaitu:

- a. Kawasan A, meliputi wilayah Gresik, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Probolinggo, Malang, Blitar, dan sekitarnya. Pada kawasan ini obyek wisata yang dikembangkan adalah wisata tirta, wisata keurbakalaan, wisata budaya, wisata agro, dan wisata konvensi.
- b. Kawasan B, meliputi wilayah Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember.
- c. Kawasan C, meliputi wilayah Kediri, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.
- d. Kawasan D, meliputi seluruh wilayah Madura.

Kabupaten Mojokerto memiliki sejumlah obyek wisata yang masuk ke dalam kawasan A. Daya tarik wisatawan di Kabupaten Mojokerto begitu beragam, mulai wisata alam, religi, sampai wisata keurbakalaan dan budaya. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan pada tahun 2018. Tercatat kunjungan wisatawan di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari kurun waktu 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Mojokerto

Uraian	2016	2017	2018
Hotel/Vila	99	99	99
Tempat Wisata	93	93	93
Restoran/Rumah Makan	29	29	29
Jumlah Wisatawan	1.346.134	1.612.667	1.735.689
Prosentase	28,6%	34,3%	36,9%

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2019

Jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan dalam kurun 2016-2018. Pada tahun 2017 sekitar 1.612.667 wisatawan (34,3%)

meningkat dari tahun 2016 sebanyak 1.346.134 wisatawan (28,6%). kemudian pada tahun 2018 juga kembali mengalami peningkatan menjadi 1.735.6899 wisatawan (36,9%) yang berkunjung di Kabupaten Mojokerto. Untuk dapat mengimbangi peningkatan wisawatawan tersebut dibutuhkan strategi pengembangan khusus disertai peningkatan sarana prasarana pendukung seperti: kondisi jalan yang memadai, akomodasi, tempat tinggal, restoran/rumah makan, dan ketersediaan alat transportasi yang layak.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah di Kabupaten Mojokerto bertujuan salah satunya untuk meningkatkan sektor pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dan juga termasuk kegiatan sektor lain yang terkait sehingga dapat mengembangkan dan meratakan kesempatan usaha dan kerja. Dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan atau seiring berkembangnya pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang diperoleh dari tempat pariwisata tersebut. Pariwisata meliputi berbagai macam usaha bisnis besar maupun kecil. Sehingga diharapkan baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkerjasama dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata guna menciptakan kesejahteraan bersama (Pendit, 2006: 73).

Pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel dibawah ini, pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 mencapai 8,5M rupiah. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 pendapatan tempat wisata sebesar 12.9M rupiah. Hingga 2018 pendapatan daerah dari sektor ini mencapai 16,4M rupiah (BPS, 2019). Dapat dikatakan bahwa pendapatn daerah di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya di sektor pariwisata terhitung dalam kurun waktu 2014-2018.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto harus lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah dan masyarakat mengingat ketersediaan sumber daya potensi keindahan alam yang ada di Mojokerto.. Berikut jenis obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.2 Jenis Obyek Wisata di Kabupaten Mojokerto

No	Jenis Pariwisata	Lokasi
Wisata Alam/ Wana Wisata		
1	Kawasan Pemandian Ubalan	Desa Padusan, Kecamatan Pacet
	Kawasan Pemandian Air Panas	Desa Seloliman, Kecamatan Trawas
	Kawasan Petirtaan Jolutundo	Desa Dlundung, Kecamatan Trawas
	Kawasan Air Tejun Dlundung	Desa Kupang, Kecamatan Jetis
	Kawasan Wana Wisata Kupang	Kecamatan Pacet
	Air terjun Cuban Canggal	Kecamatan Jetis
	Wisata air sungai Brantas	Desa Padusan, Kecamatan Pacet
Wisata Budaya		
2	Kawasan Candi Bajang Ratu	Desa Temon, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Candi Tikus	Desa Temon, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Candi Brahu	Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Situs Centong	Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Candi Wringin Lawang	Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Kolam Segaran	Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Makam Putri Cempo	Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Candi Minakjinggo	Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Situs Majapahit	Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Candi Sumur Upas	Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Makam Troloyo	Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Situs Lantai Enam	Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan
	Kawasan Yoni Klintorejo	Desa Klintorejo, Klintorejo, Kecamatan Sooko
	Kawasan Candi Kesiman Tengah	Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Trawas
	Kawasan Prasasti Kembang Sore	Desa Petak, Kecamatan Pacet
	Kawasan Situs Kutogirang	Desa Kotogirang, Kecamatan Ngoro
	Kawasan Candi Brangkal	Desa Jedong, Kecamatan Ngoro
	Kawasan Candi Pasentran	Desa Jedong, Kecamatan Ngoro
	Kawasan Candi Lurah dan Carik	Desa Kedungudi, Kecamatan Trawas
	Kawasan Kekunoan Kendali Sodo	Desa Seloliman, Kecamatan Trawas
	Candi Brangkal	Kecamatan Pacet
Dam Tanjungan	Kecamatan Kemlagi	
Makam Siti Hinggi	Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan	

Sumber: RIPPDA Kabupaten Mojokerto 2018

Sebagian besar obyek wisata yang disebutkan pada tabel 1.2 diatas, Kecamatan Trowulan menjadi lokasi paling banyak ditemukan keberadaan obyek wisata keurbakalaan dan budaya dengan potensi tinggi. Obyek wisata tersebut antara lain: Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Brahu, Situs Candi Gentong, Candi Wringin Lawang, Kolam Segaran, Makam Putri Campa, Candi Minak Jinggo, Situs Majapahit, Sumur Upas, Makam Troloyo, Museum Trowulan, Kubur Panggung, Siti Inggil, Pendopo Agung, dan Maha Vihara Majapahit.

Tabel 1.3 Tingkat Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Mojokerto

No	Obyek Wisata	Nilai Daya Tarik	Nilai Rata-Rata	Tingkat Potensi
1	Air Panas Pacet	1050	667	Potensi Tinggi
2	Air Terjun Coban Cunggu	495		Potensi Rendah
3	Wahana Wisata Cagar Budaya Gunung Penanggungan	1000		Potensi Tinggi
4	Wana Wisata Air Terjun Dlundung	440		Potensi Rendah
5	Candi Bajangratu	690		Potensi Tinggi
6	Candi Tikus	940		Potensi Tinggi
7	Candi Brahu	740		Potensi Tinggi
8	Situs Candi Gentong	375		Potensi Rendah
9	Candi Wringin Lawang	1015		Potensi Tinggi
10	Kolam Segaran	625		Potensi Rendah
11	Makam Putri Cempa	770		Potensi Tinggi
12	Candi Menakjinggo	375		Potensi Rendah
13	Situs Majapahit	245		Potensi Rendah
14	Sumur Upas	245		Potensi Rendah
15	Makam Troloyo	1150		Potensi Tinggi
16	Museum Trowulan	1075		Potensi Tinggi
17	Kubur Panggung	395		Potensi Rendah
18	Siti Inggil	720		Potensi Tinggi
19	Candi Bangkal	340		Potensi Rendah
20	Candi Jedong	500		Potensi Rendah
21	Petirtaan Jolotundo	900		Potensi Tinggi
22	Candi Pasetran	465		Potensi Rendah
23	Reco Lanang	615		Potensi Rendah
24	Reco Wedok	275		Potensi Rendah
25	Candi Kesimen Tengah	215		Potensi Rendah
26	Pemandian Ubalan	1105		Potensi Tinggi
27	Pendopo Agung	840		Potensi Tinggi
28	Maha Vihara Majapahit	1075		Potensi Tinggi

Sumber: RIPPDA Kabupaten Mojokerto 2018

Dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Trowulan memiliki beberapa obyek wisata dengan nilai daya tarik diatas 600 yakni Candi Bajangratu, Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Wringin Lawang, Makam Putri Campa, Makam Troloyo, Museum Trowulan, Siti Inggil, Pendopo Agung dan Maha Vihara Majapahit. Penilaian daya tarik tersebut berdasarkan Analisis data menggunakan Pedoman Analisis Daerah Operasi Obyek dan Daya Tarik Wisata alam (ADO-ODTWA) Dirjen PHKA 2003. Komponen yang dinilai yaitu (1) Daya tarik objek wisata; (2) Aksesibilitas; (3) Kondisi lingkungan sosial ekonomi; (4) Akomodasi; (5) Sarana dan prasarana penunjang; (6) Ketersediaan air bersih; (7) Keamanan; dan (8) Kenyamanan. Jumlah nilai dari masing-masing kriteria dapat dihitung dengan melakukan perkalian antara jumlah nilai unsur-unsur pada kriteria dengan bobot nilai. Berikut klasifikasinya:

Tabel 1.4 Klasifikasi Unsur Pengembangan Berdasarkan Nilai Bobot

No.	Nilai Total	Penilaian Potensi Unsur
1	660 – 879	Potensial dikembangkan
2	4800 – 659	Cukup Potensial dikembangkan
3	281– 479	Tidak Potensial dikembangkan

Sumber: Jurnal Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura 2018

Untuk melihat daya tarik dari masing-masing objek wisata diperlukan analisis kegiatan wisata yang terdiri dari tiga syarat yaitu *something to do*, *something to buy*, dan *something to see*. *Something to do* yang dimiliki oleh obyek wisata di Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh motif wisatawan untuk berkunjung yakni berhubungan dengan kebutuhan badaniah, menikmati pemandangan alam mengenal kebudayaan baik bangunan, musik, tarian, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Beberapa *something to do* yang ada di daerah wisata Kecamatan Trowulan yakni ziarah makam wali, grebeg syuro, event tahunan Java jazz Majapahit, dan grebeg 1 Muharram.

Kemudian untuk *something to see* yang dimiliki oleh obyek wisata di Kabupaten Mojokerto antara lain: pemandangan alam yang indah dan layak dijual untuk menarik minat wisatawan serta peninggalan benda-benda purbakala dan budaya yang bernilai tinggi. Kabupaten Mojokerto yang kaya akan obyek wisata alam memiliki sejumlah daya tarik yang dapat dinikmati, di antaranya adalah pemandangan yang berupa pegunungan, air terjun, suasana agrowisata, pemandangan waduk, dan sejumlah pemandangan alam yang menarik lainnya. Di Kecamatan Trowulan sendiri yang menjadi daya tarik *something to see* berupa bangunan Candi, Museum, Kolam Segaran hingga Maha Vihara atau patung budha Tidur yang masuk dalam kategori patung terbesar di Asia Tenggara.

Selanjutnya dari karakteristik *something to buy* dapat diartikan sebagai kegiatan wisatawan untuk membelanjakan uangnya di dalam obyek wisata. Belanja dapat dilakukan untuk memenuhi minat atau permintaan wisatawan akan kebutuhan makan, minum dan barang-barang kerajinan sebagai cinderamata. Selain untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, penyediaan sarana belanja juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan produksi cinderamata dan produk khas Kabupaten Mojokerto lainnya. *Something to buy* yang dapat ditemukan di Kecamatan Trowulan beraneka ragam mulai dari pernak-pernik dan cinderamata berukuran kecil hingga berukuran besar seperti patung, dan benda-benda lain yang bersal dari cor logam maupun kerajinan tangan dari tanah liat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013 maka sebagai tindak lanjutnya adalah adanya alokasi bantuan keuangan khusus untuk pembangunan program Rumah Majapahit. Salah satu yang menjadi tujuannya adalah pengembangan dan pemanfaatan kawasan Majapahit.

Rumah Majapahit merupakan salah satu program pengelolaan kekayaan budaya yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. Program Rumah Majapahit ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 yang difasilitasi oleh

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaannya program Rumah Majapahit menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan melalui penyaluran bantuan keuangan khusus kepada masyarakat dan dirancang untuk memberikan identitas Rumah Majapahit serta sebagai promosi potensi pariwisata daerah.

Program Rumah Majapahit digulirkan dalam bentuk melakukan pemugaran bagian depan rumah warga menjadi bangunan rumah menyerupai perkampungan Kerajaan Majapahit. Tidak semua rumah warga di Trowulan menerima bantuan ini melainkan hanya rumah warga yang berada di jalur utama menuju objek wisata wisata peninggalan Cagar Budaya Majapahit. Terhitung pada rentan tahun 2014 dan 2015 program Rumah Majapahit berhasil dilaksanakan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Bejjong, Desa Sentonorejo, dan Desa Jatipasar. Hingga akhir tahun 2015 telah berdiri sebanyak 291 Rumah Majapahit. Pada tahun 2016, pembangunan Rumah Majapahit diperluas sasarannya hingga merambah ke Desa Trowulan, Temon, dan Watesumpak dengan penambahan total 300 unit Rumah Majapahit. Namun dalam realisasinya pemerintah berhasil menambah 154 Rumah Majapahit saja. Berikut rincian jumlah pembangunan Rumah Majapahit:

Tabel 1.5 Jumlah Sebaran Rumah Majapahit

No	Nama Desa	Jumlah	Prosentase
1	Jatipasar	51	11,4 %
2	Bejjong	194	43,5 %
3	Sentonorejo	46	10,3 %
4	Trowulan	62	13,9 %
5	Watesumpak	45	10,11 %
6	Temon	47	10,5 %
Jumlah		445	100%

Sumber: Diolah dari Disporabudpar Mojokerto 2015

Berdasarkan tabel 1.5 diatas mengenai jumlah sebaran Rumah Majapahit dapat diketahui bahwa dari enam desa yang menerima bantuan program tersebut di masing-masing desa memiliki jumlah yang berbeda dengan total keseluruhan jumlah yang ada di Kecamatan Trowulan sebanyak 445 unit Rumah Majapahit. Di Desa Bejjong memiliki jumlah Rumah Majapahit paling banyak yakni 194 unit dengan prosentase sebesar 43,5%. Kemudian Desa Trowulaan sebanyak 62 unit Rumah Majapahit atau sebesar 13,9%. Desa Jatipasar sebanyak 51 unit atau 11,4%, dan Desa Wates Sumpak sebanyak 10,11%, Desa Temon sebanyak 47 unit atau sebesar 10,5% dan terakhir dengan jumlah unit paling sedikit yakni Desa Sentonorejo yang berjumlah 46 unit Rumah Majapahit atau sebesar 10,3%.

Sebaran jumlah Rumah Majapahit di enam desa tersebut berbeda yangmana hal tersebut pengaruhi oleh beberapa hal yakni salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam penerimaan program, potensi desa sebagai tujuan wisata dalam artian banyaknya situs atau obyek wisata di desa bersangkutan, dan dari sisi geografis desa yang menguntungkan atau tidak.

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program Rumah Majapahit sendiri dibebankan pada *sharing* dana APBD pemerintah Propinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggraan 2014.

Tabel 1.6 Alokasi Anggaran Pembangunan Rumah Majapahit Tahap 1

No	Nama Desa	APBD Provinsi (Rp)	APBD Kabupaten (Rp)	Jumlah
1	Jatipasar	920.000.000	230.000.000	1.150.000.000
2	Bejjong	4.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000
3	Sentonorejo	1.000.000.000	250.000.000	1.250.000.000
Jumlah		5.920.000.000	1.480.000.000	7.400.000.000
Prosentase		80%	20%	100%

Sumber: Disporabudpar Mojokerto 2015

Bantuan keuangan yang disalurkan dalam program Rumah Majapahit pada tahap I menghabiskan anggaran sebesar 7,4 Miliar. Anggaran tersebut merupakan hasil *sharing* anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 5,92 Miliar atau 80% dan sisanya 20% anggaran pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni sebesar 1,48 Miliar. Dari realisasi pembangunan tahap pertama di tiga desa tersebut mengeluarkan anggaran yang berbeda tiap desanya, yakni paling besar anggaran dikeluarkan di Desa Bejjong mencapai 5 Miliar atau 67,5% dari total anggaran realisasi pada tahap pertama. Kemudian disusul Desa Sentonorejo sebesar 16,8% atau sebesar 1,25 Miliar dan Desa Jatipasar dengan prosentase 15,5% atau sebesar 1,15 Miliar.

Kemudian untuk realisasi pembangunan Rumah Majapahit pada tahap kedua mengalami kenaikan anggaran pembangunan. Dari rencana awal pembangunan 300 rumah yang kemudian berhasil direalisasikan sebanyak 154 rumah. Kenaikan anggaran rata-rata-rata menjadi 84 juta per unit. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala bagian Humas Pemkab Mojokerto Alfiah Ernawati, sebagai berikut:

“Untuk tahun ini, membengkak menjadi rata-rata hingga Rp 84 juta per unit. Tak pelak, dengan anggaran hampir Rp 13 miliar itu, jumlah Rumah Majapahit yang akan dibangun hanya 154 unit. “Ada peningkatan kualitas, ditambah harga material juga ada kenaikan,” tutur Ernawati pada Berita Metro, Jumat (2/9/16), di (<http://www.beritametro.news/mojokerto/pendirian-300-rumah-majapahit-di-trowulantak-sesuai-rencana>, diakses 20 April 2018).

Lebih lanjut mengenai anggaran realisasi pembangunan Rumah Majapahit tahap kedua sebagai berikut

Tabel 1.7 Alokasi Anggaran Pembangunan Rumah Majapahit Tahap 2

No	Nama Desa	APBD Provinsi (Rp)	APBD Kabupaten (Rp)	Jumlah
1	Jatipasar	1.400.000.000	280.000.000	1.680.000.000
2	Bejjong	4.750.000.000	950.000.000	5.700.000.000
3	Sentonorejo	1.250.000.000	250.000.000	1.500.000.000
Jumlah		7.400.000.000	1.480.000.000	8.880.000.000
Prosentase		83,3%	16,6%	100%

Sumber: Disporabudpar Mojokerto 2015

Bantuan keuangan yang disalurkan dalam program Rumah Majapahit pada tahap 2 menghabiskan anggaran sebesar 8,88 Miliar. Anggaran tersebut merupakan hasil *sharing* anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 7,4 Miliar atau 83,3% dan sisanya 16,6% anggaran dari pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni sebesar 1,48 Miliar. Dari realisasi pembangunan tahap kedua di tiga desa tersebut mengeluarkan anggaran yang berbeda tiap desanya, yakni paling besar anggaran dikeluarkan di Desa Bejjong mencapai 5,7 Miliar atau 64,1% dari total anggaran realisasi pada tahap pertama. Kemudian disusul Desa Jatipasar sebesar 18,9% atau sebesar 1,68 Miliar dan Desa Sentonorejo dengan prosentase 16,8% atau sebesar 1,5 Miliar.

Program Rumah Majapahit menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengembangan pemanfaatan pariwisata yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui adanya usaha ekonomi kreatif. Selayaknya keberadaan pariwisata mampu menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak. Semua itu dapat tercapai apabila industri pariwisata dikembangkan secara terencana, dikelola secara profesional, berkeseimbangan, dan berkelanjutan sehingga

dapat meminimalisir dampak negatif yang sekiranya ditimbulkan dari adanya pengembangan pariwisata tersebut (Yoeti, 2008: 4).

Keberadaan Rumah Majapahit selain sebagai upaya menghidupkan semangat Majapahit dan menjadi daya tarik wisata baru bagi masyarakat juga difungsikan sebagai *homestay* wisatawan, sentra kuliner, dan pusat *souvenir* khas Majapahit sebagai salah satu pola pemberdayaan bagi masyarakat. Hal tersebut ditujukan sebagai langkah pemerintah dalam usaha promosi serta pembinaan pariwisata. Hingga tahun 2016, terdapat 30 Rumah Majapahit yang terealisasi sebagai *homestay* di Desa Bejjong, menurut Ustadzi Rois (<https://nasional.tempo.co/read/791434/ratusan-rumah-bergaya-arsitektur-majapahit-disalahgunakan/> diakses 4 Februari 2018).

Di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya siap untuk mengelola Rumah Majapahit. Masyarakat mengaku bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan dalam memanfaatkan Rumah Majapahit tersebut. Rumah Majapahit yang telah berdiri sebagian besar digunakan oleh masyarakat sebagai warung dan toko. Masyarakat setempat menyatakan bahwa mereka belum mendapat pelatihan pemanfaatan Rumah Majapahit yang dijanjikan oleh Pemerintah (<https://nasional.tempo.co/read/791434/ratusan-rumah-bergaya-arsitektur-majapahit-disalahgunakan/> diakses 4 Februari 2018). Selain sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan satuan geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, program Rumah Majapahit diharapkan memberikan dampak besar bagi perkembangan pariwisata di wilayah Trowulan dan dapat membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan peneliti yang dipaparkan diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan kajian evaluasi dari pelaksanaan program Rumah Majapahit. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan program dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan input maupun output pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan potensi pariwisata.

Evaluasi menurut Winarno (2012: 228) sebagai suatu tahap akhir dalam proses kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk dapat melihat penyebab kendala yang dihadapi, kegagalan program begitu juga dampak yang dihasilkan dari program tersebut dengan kata lain bahwa evaluasi bertujuan untuk menilai suatu kebijakan atau program.

Sedangkan Agustino (2006: 186) memandang bahwa evaluasi kebijakan sebagai sebuah aktivitas fungsional karena perumus kebijakan selalu membuat penilaian melalui pendapat mereka mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program, dan proyek yang sedang dan/atau telah dilaksanakan. Menurut Agustino ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan evaluasi: 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan. 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dari masalah yang sedang dihadapi. 3) Evaluasi kebijakan turut serta memberi sumbangan terhadap kebijakan lain khususnya dari sisi metodologi.

Adapun penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai evaluasi program pengembangan pariwisata adalah skripsi yang ditulis oleh Erik Sanjaya, Program Studi Sarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada tahun 2017 dengan judul “Evaluasi Program Kampung UKM Digital di Desa Wisata Mandala Borobudur, Magelang”. Pada penelitian ini penulis memfokuskan diri pada evaluasi implementasi program. Latar belakang penelitian ini berangkat dari keberadaan Kampung Digital yang berlokasi di Desa Wanurejo atau Desa Wisata Mandala Borobudur sudah berjalan selama dua tahun dan belum memberikan dampak perubahan yang signifikan khususnya bagi pihak yang berperan sebagai UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam implementasi yang menjadi penyebab program berjalan kurang efektif. Salah satunya disebabkan oleh faktor penyampaian informasi dan sosialisasi terkait program tersebut ditambah dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat.

Selanjutnya penelitian lain dengan tema evaluasi di bidang pariwisata juga dilakukan oleh Irene Tivani, Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2016 dengan judul “Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja”. Latar belakang penelitian tersebut adalah banyaknya potensi alam dan budaya yang dimiliki Tana Toraja belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai sarana dan prasarana pengelolaan pariwisata termasuk pemasaran pariwisata kurang lengkap ditambah dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang cenderung diabaikan oleh pemerintah di Tana Toraja. Evaluasi yang dilakukan peneliti tersebut memfokuskan diri pada program pengembangan pariwisata dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Hasil dari penelitian tersebut terbagi dalam dua bahasan yang pertama mengenai evaluasi program pengembangan pariwisata yang mana dilihat dari segi proses, manfaat, dan dampak bagi masyarakat sekitar lokasi wisata di Tana Toraja. Yang kedua, mengenai faktor pendukung dan penghambat program. Faktor penghambat program mencakup ketersediaan dana, sarana dan prasarana, kondisi geografis, dan minimnya informasi mengenai Tana Toraja. Sedangkan faktor pendukung program yaitu obyek wisata yang sudah dikenal masyarakat, adanya partisipasi masyarakat, dan koordinasi antara pihak terkait.

Sementara itu penelitian lainnya dilakukan oleh Amin Sapto Saputro, Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 2016 dengan judul “Evaluasi Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014”. Latar belakang penulis mengangkat tema penelitian ini didasarkan pada keberadaan potensi wisata Baturraden sebagai penyumbang PAD Kabupaten Banyumas dengan jumlah yang cukup signifikan sehingga pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam melakukan pengelolaan pariwisata. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas melalui pengembangan obyek wisata Baturraden. Dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas kaitannya dalam melakukan pengembangan obyek wisata Baturraden dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan produk wisata, pemasaran dan promosi,

serta pengembangan investasi. Kemudian evaluasi yang dilakukan menekankan pada proses implementasi program yang melibatkan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan pariwisata tersebut khususnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian lain yang ditulis oleh Fitria Apriliani Dewi, Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, pada tahun 2012 dengan judul “Evaluasi Program Pengembangan Kampung Batik Laweyan dalam Menunjang Pariwisata Kota Surakarta”. Penulis mendeskripsikan latar belakang penelitiannya yakni adanya penurunan industri pariwisata Kampung Batik di Laweyan yang terjadi karena kurang berminatnya wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut terjadi karena kurangnya promosi untuk memperkenalkan potensi Kampung Batik serta keberadaan pasar yang cenderung mengalami kelesuan ekonomi akibat adanya pengusaha batik lain dengan bermodalkan lebih besar dan penggunaan teknik produksi yang lebih maju. Penelitian evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada indikator efektivitas, responsivitas, dan ketepatan program. Kesimpulan dari penelitian tersebut berdasarkan hasil evaluasi dengan indikator efektivitas dikatakan berhasil, terbukti dengan pencapaian beberapa hal yang berkaitan dengan program seperti penyusunan *grand design* tata ruang, *grand design* ekonomi, *grand design* konservasi, sosial budaya, *grand design* manajemen, dan *grand design* pemanfaatan IT. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dengan indikator responsivitas, dikatakan berhasil dengan melihat dari adanya kepuasan dari para pengusaha dan masyarakat di Laweyan melalui terbentuknya forum sebagai wadah penyampaian keluhan, kritik, maupun aspirasi. Selanjutnya hasil evaluasi dengan indikator ketepatan, juga dinilai berhasil karena dari pengembangan Kampung Batik ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat khususnya bagi masyarakat sekitar Laweyan.

Berdasarkan studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus dan lokus penelitian. Pada penelitian ini lokus berada di Kecamatan

Trowulan Kabupaten Mojokerto. Dengan fokus penelitian mengkaji tentang evaluasi pelaksanaan program Rumah Majapahit serta dampak pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Rumah Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana dampak program Rumah Majapahit terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program Rumah Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk dapat mengidentifikasi dampak program Rumah Majapahit terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Berdasarkan pada studi terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya dengan tema yang sama yakni tentang evaluasi program pengembangan pariwisata. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian yangmana untuk melengkapi kesenjangan dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program Rumah Majapahit dan potensi pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan, masukan, dan saran kepada pihak terkait pelaksana program Rumah Majapahit khususnya bagi segenap Pemerintah Desa di Kecamatan Trowulan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang memiliki kewenangan dalam program Rumah Majapahit serta lebih jauh dalam konteks pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

1.5 Kerangka Teori

Teori menjadi hal yang fundamental dalam sebuah kerangka kerja penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti dituntut untuk menggunakan literatur yang konsisten. Teori dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut, seraya membandingkan hasilnya dengan temuan-temuan penelitian lainnya (Creswell, 2014: 40). Hendaknya teori yang dipaparkan dengan jelas oleh peneliti pada kerangka teori dan juga harus relevan dengan masalah penelitian.

1.5.1 Evaluasi Kebijakan

1.5.1.1 Definisi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan menilai keberhasilan atau kegagalan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Dimana indikator tersebut merujuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil. Menurut Indiahono (2009: 145) aspek proses menunjuk apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan. Kemudian aspek hasil menunjuk pada kebijakan yang telah diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang sudah ditetapkan. Definisi tersebut menekankan pada dua aspek yang diperhatikan dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu aspek proses dan aspek hasil. Keputusan dari suatu kebijakan publik dapat dinilai apakah berhasil atau tidak berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

Sedangkan Agustino (2006: 186) memandang bahwa evaluasi kebijakan sebagai sebuah aktivitas fungsional karena perumus kebijakan selalu membuat penilaian melalui pendapat mereka mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program, dan proyek yang sedang dan/atau telah dilaksanakan. Menurut Agustino ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan evaluasi: 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan. 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dari masalah yang sedang dihadapi. 3) Evaluasi kebijakan turut serta memberi sumbangan terhadap kebijakan lain khususnya dari sisi metodologi.

Definisi lain dari evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012: 229) bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah memberikan dampak seperti yang diinginkan. Lebih lanjut Lester dan Stewart membedakan evaluasi kebijakan publik dalam dua tugas yang berbeda. Tugas *pertama*, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang muncul akibat dari adanya kebijakan dengan cara membuat gambaran dampaknya. Hal ini merujuk pada apakah program atau kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan atau tidak. Tugas *kedua*, merupakan lanjutan dari tugas yang pertama, yakni dilakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Berbagai pendapat mengenai definisi evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh para ahli dengan menekankan pada titik tertentu baik berupa tujuan, proses, sistem, nilai maupun dampak dari evaluasi yang menjadi sorotan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah merupakan tahap akhir dari suatu tahapan kebijakan yang menyangkut penilaian suatu kebijakan dengan tujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan apakah sudah sesuai dengan pedoman guna meningkatkan kinerja kebijakan, melihat penyebab kegagalan/keberhasilan dari suatu kebijakan, dan untuk mengetahui dampak yang diberikan setelah adanya kebijakan tersebut selesai diimplementasikan.

1.5.1.2 Jenis Evaluasi Kebijakan

Berikut ini jenis evaluasi kebijakan dibedakan menjadi dua menurut Wollman (2007: 395) :

1. Evaluasi Internal

Yaitu evaluasi yang dilakukan menyangkut lembaga itu sendiri dan dalam lembaga itu sendiri. Dengan kata lain evaluasi internal disebut sebagai evaluasi diri. Menurut pendapat lainnya, jenis evaluasi ini dinilai kurang sistematis karena bentuk penyampaian laporan dilakukan atas pengawasan yang hirarkis di internal lembaga. Sehingga dalam evaluasi manajemen publik diterapkanlah konsep pemantauan dan pengendalian berdasarkan indikator kinerja. Indikator tersebut dapat berupa pengaplikasian sistem pembiayaan internal yang komperhensif.

2. Evaluasi Eksternal

Merupakan evaluasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berada di luar lembaga yang dievaluasi. Disini evaluasi berperan sebagai sarana untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh administrator.

1.5.1.3 Tipe Evaluasi Kebijakan

Wall (1994:1) menawarkan tipe evaluasi lain yang dapat digunakan dalam penelitian evaluasi kebijakan seperti berikut ini:

1. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif atau sering disebut sebagai evaluasi hasil dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari suatu program. Hasil dari evaluasi sumatif berguna dalam perbaikan program yang akan datang. Evaluasi sumatif berkaitan dengan efektivitas program.

2. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif disebut juga sebagai evaluasi proses atau evaluasi implementasi yang dilakukan untuk mengetahui berbagai aspek program yang sedang berjalan guna meningkatkan kinerja program yang sedang dilaksanakan.

Tipe evaluasi kebijakan berikutnya dikemukakan oleh Wollmann (2007:393) berdasarkan hubungan fungsi dan waktu yakni sebagai berikut:

1. Evaluasi *Ex-ante*

Tipe evaluasi ini dimaksudkan guna mengkaji akibat atau konsekuensi yang timbul dari kebijakan atau tindakan yang direncanakan atau ditetapkan untuk dapat menyumbangkan informasi ke dalam proses pengambilan keputusan yang akan datang atau yang sedang berlangsung secara hipotesis. Evaluasi *ex-ante* sebagai instrumen untuk membuat pilihan dari berbagai alternatif kebijakan dengan cara analitis, lebih transparan, lebih dapat diperkirakan, dan secara politis dapat diperdebatkan. Jenis evaluasi ini disebut juga sebagai evaluasi berkelanjutan karena memiliki tugas mengidentifikasi hasil kebijakan dan pengambilan langkah-langkah kebijakan sementara, dalam siklus kebijakan, implementasi, dan realisasi dari kebijakan yang masih berjalan. Fungsi penting dari evaluasi berkelanjutan adalah memberikan umpan balik informasi yang relevan dalam proses implementasi pada satu titik dan tahapan ketika informasi terkait dapat digunakan secara berurutan untuk menyesuaikan, memperbaiki atau mengarahkan proses implementasi bahkan menjadi dasar keputusan kebijakan utama.

2. Evaluasi *Ex-post*

Merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan efek dari kebijakan dan tindakan. Secara karakteristik, evaluasi kebijakan memiliki dua tugas. *Pertama*, dimaksudkan untuk menghasilkan penilaian tentang sejauh mana pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. *Kedua*, evaluasi kebijakan diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan apakah efek dan perubahan yang diamati telah benar-benar (kausal) terkait kebijakan atau program yang dimaksud.

James Anderson (dalam Winarno, 2012: 230) membagi tipe evaluasi kebijakan publik ke dalam tiga tipe yang didasarkan atas pemahaman evaluator terhadap evaluasi, yakni:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional

Kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Pembentukan kebijakan disini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengenai manfaat serta dampak kebijakan atau program. Dari pertimbangan-pertimbangan inilah yang tidak lepas dari campur tangan kepentingan aktor didalamnya baik dipengaruhi oleh ideologi maupun karena perbedaan kriteria yang digunakan evaluator sebagai acuan dalam melakukan evaluasi.

2. Evaluasi memfokuskan pada kinerja dari kebijakan atau program tertentu

Dalam evaluasi ini menitikberatkan pada bekerjanya suatu program atau kebijakan dengan membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Kelemahan dalam tipe ini adalah cenderung menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak dari suatu program di masyarakat.

3. Evaluasi kebijakan sistematis

Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauhmana kebijakan tersebut dapat menjawab permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari tipe evaluasi ini akan memberikan suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perbaikan kebijakan.

Dari beberapa tipe evaluasi yang disebutkan di atas, peneliti dalam penelitian ini mengacu pada evaluasi summatif. Alasan menggunakan evaluasi summatif karena obyek yang diteliti telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini juga termasuk dalam *Ex-post Evaluation*. Dimana peneliti memfokuskan diri pada perubahan-perubahan yang diamati dalam program Rumah Majapahit.

1.5.2 Evaluasi Program

Menurut Wall (1994) evaluasi program adalah pengumpulan dan analisis data informasi secara sistematis dan cermat yang digunakan untuk mengetahui efektifitas

dan dampak, membangun akuntabilitas dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perubahan dan perbaikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa evaluasi program adalah proses yang sistematis untuk menentukan keberhasilan suatu program. Hal ini membahas pertanyaan tentang apakah dan sejauh mana program mencapai tujuan dan sarannya.

“An evaluation is a purposeful, systematic, and careful collection and analysis of information used for the purpose of documenting the effectiveness and impact of programs, establishing accountability and identifying areas needing change and improvement (Wall, 1994: 1).”

Evaluasi program dapat diterapkan terhadap sebagian atau keseluruhan unsur-unsur implementasi program. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan. Apakah berhasil mencapai maksud dari program yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak dapat diketahui tingkat pencapaian tujuannya.

1.5.2.1 Pendekatan Evaluasi Program

Pendekatan dalam evaluasi yang berkontribusi guna mengukur tingkat keberhasilan program menurut Patton dan Sawicki (2016: 352-360) terbagi kedalam 6 (enam) kategori sebagai berikut:

1. Before and After Comparisons

Pada pendekatan memiliki karakteristik antara lain hanya berlaku untuk satu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi. Membandingkan kondisi masyarakat tertentu sebelum dan sesudah adanya program.

2. *With vs Without Comparisons*

Karakteristik dari pendekatan jenis ini membandingkan antara komunitas yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan.

3. *Actual vs Planned Performance Comparisons*

Pendekatan jenis ini antara lain membandingkan pelaksanaan program secara aktual antara rencana dengan kenyataan di lapangan apakah sesuai atau tidak. Perbandingan dilakukan guna memperoleh kualitas kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

4. *Experimental Models*

Karakteristik dari pendekatan ini yakni dengan melihat dampak dari perubahan kebijakan/*policy* terhadap suatu kegiatan yang memiliki standar ketat. Dampaknya dilihat dari proses dan hasil kegiatan tersebut.

5. *Quasi Experimental Models*

Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/*policy* terhadap suatu kegiatan dengan mengukur hasil dari suatu program atau kebijakan dalam bentuk skor, angka atau indikator lain. Pendekatan ini tidak memiliki standar tertentu. Dampaknya dilihat hanya berdasarkan hasilnya saja, sedangkan prosesnya diabaikan.

6. *Cost Oriented Evaluation Approaches*

Merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengukuran dampak kebijakan dalam bentuk keuntungan, baik berupa keuntungan bersih, uang ataupun estimasi biaya. Terdapat dua tipe dalam pendekatan ini yakni 1) analisis keuntungan biaya yang dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dengan input dalam bentuk uang, dan 2) analisis keefektifan biaya yang dilakukan dengan upaya pencapaian tujuan program atau kebijakan dengan biaya seminimal mungkin.

Metode evaluasi program Rumah Majapahit dalam penelitian ini menggunakan metode *actual vs planned performance comparisons*. Metode ini dipilih dengan pertimbangan dalam penelitian ini evaluasi ditujukan untuk dapat

mengetahui bagaimana capaian program dengan membandingkan pelaksanaan program secara aktual antara rencana dengan kenyataan di lapangan apakah sesuai atau tidak.

1.5.2.2 Kriteria Evaluasi Program Rumah Majapahit

Kriteria merupakan pernyataan khusus tentang dimensi-dimensi sasaran (*objectives*) yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan atau program (Nugroho, 2007: 74). Ripley (dalam Purwanto dkk 2015: 106-110) menjelaskan kriteria untuk menilai suatu kebijakan menekankan pada pencapaian tujuan dari usaha/kinerja yang telah dilakukan dalam evaluasi kebijakan. Menurut Ripley aspek yang digunakan untuk menilai kualitas output suatu kebijakan, sebagai berikut:

1. Aksesibilitas

Kriteria ini digunakan untuk mengetahui mudah tidaknya program dijangkau oleh kelompok sasaran. Akses diartikan sebagai kemudahan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan atau program. Akses juga dapat diartikan sebagai kesamaan kesempatan yang diberikan kepada semua kelompok sasaran. Semua kelompok sasaran memiliki kesempatan yang sama untuk bisa merasakan program yang telah dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Dengan kata lain, akses berarti tidak terjadi diskriminasi terhadap kelompok sasaran untuk dapat menikmati manfaat kebijakan atau program. Pada penelitian ini akses diartikan sebagai kemudahan bagi sasaran program dalam memanfaatkan program yang ada. Kelompok sasaran dalam program ini memiliki hak yang sama tidak ada satu pengecualian apapun termasuk dalam menerima arus informasi.

2. Cakupan

Cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dijangkau oleh kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Prosedur untuk mengukur

cakupan ada 2 yakni: a). menentukan siapa saja yang akan menjadi kelompok sasaran dan b). membuat perbandingan jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapatkan pelayanan terhadap total kelompok yang ditargetkan. Cakupan dalam penelitian ini mencakup jumlah dan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran program. Dalam program Rumah Majapahit ini kelompok sasaran merupakan mereka yang memiliki rumah atau tempat tinggal di Kecamatan Trowulan. Kemudian cakupan dalam penelitian ini juga mencakup perbandingan kelompok sasaran yang sudah menerima program Rumah Majapahit dari yang seharusnya ditargetkan.

3. Frekuensi

Kriteria frekuensi digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan atau menggunakan pelayanan dari suatu kebijakan atau program. Kriteria frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang jenis pelayanannya tidak diberikan hanya sekali, melainkan berulang-ulang kali. Frekuensi dalam penelitian diartikan sebagai seberapa sering atau intensitas kelompok penerima sasaran dalam menggunakan atau memanfaatkan program Rumah Majapahit.

4. Bias

Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan atau program menyimpang kepada kelompok masyarakat yang tidak menjadi sasaran. Pelaksana tidak boleh memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program diutamakan untuk kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Bias dalam penelitian ini diartikan sebagai ketepatan dalam penyaluran program. Mengetahui pelaksanaan program Rumah Majapahit apakah sudah sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

5. Ketepatan

Kriteria ini digunakan untuk menilai pelaksanaan suatu kebijakan atau program dilakukan dengan tepat atau tidak. Jika terjadi keterlambatan ataupun salah sasaran

dalam pelaksanaan program, maka hal tersebut dapat berdampak pada kegagalan dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini ketepatan pelayanan diartikan sebagai ketepatan program dalam kelompok sasaran, waktu pelaksanaan dan pemanfaatan program Rumah Majapahit. Program Rumah Majapahit ini terlaksana dalam 2 tahapan waktu pelaksanaan. Dalam tahap satu dan tahap dua terdapat perbedaan capaian program Rumah Majapahit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah para pelaksana bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa bertanggung jawab kepada kelompok sasaran tanpa mengurangi hak-hak yang patut didapatkan oleh kelompok sasaran. Jika pengurangan hak-hak kelompok sasaran terjadi, maka hal tersebut harus dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban atas adanya program Rumah Majapahit. Program Rumah Majapahit seharusnya dapat dipertanggung jawabkan baik dihadapan kelompok sasaran maupun di hadapan pemerintahan selaku pemegang kewenangan program.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kriteria ini digunakan untuk mengukur apakah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima oleh kelompok sasaran. Selain itu kriteria ini juga digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau program yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini kesesuaian program dimaksudkan apakah program Rumah Majapahit tersebut sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran dan dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran.

1.5.3 Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang No. 09 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, kepariwisataan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

penyelenggaraan dan pengusaha objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, serta usaha-usaha lain yang terkait.

Wisata adalah suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian perjalanan wisata dapat dikatakan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu (Suwanto, 2004: 3).

Sedangkan dalam buku Pengantar Ilmu Pariwisata oleh Yoeti memberikan definisi bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk bekerja di tempat yang dikunjungi tapi semata-mata untuk bertamasya dan berekreasi (Yoeti, 1993: 10).

Pengertian lain oleh Spillane (1985: 5), pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, maupun ilmu.

Dari berbagai pengertian mengenai pariwisata yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengunjungi suatu tempat tertentu guna bertamasya melepas penat atau mengisi waktu libur ataupun dengan tujuan tertentu seperti wisata edukasi.

Pariwisata diperinci dalam beberapa jenis golongan yakni menurut Nyoman S. Pendit (1999: 42-48) sebagai berikut yaitu :

1) Wisata Budaya

Merupakan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.

2) Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi

kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang memiliki iklim udara menyehatkan atau tempat yang memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

3) Wisata Olahraga

Wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau. memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam peserta olahraga atau dengan tujuan untuk menghadiri turnamen olahraga.

4) Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

1.5.3.1 Komponen Pariwisata

Sistem pariwisata terdiri dari 7 (tujuh) komponen, berdasarkan klasifikasi Leiper (1990) dalam Pitana (2009: 63), komponen tersebut merupakan sektor utama dalam kepariwisataan yang saling terkait, tergantung, dan terpadu yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Pemasaran (*The Marketing Sector*)

Mencakup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata, misalnya, kantor biro perjalanan dengan jaringan cabangnya, kantor pemasaran maskapai penerbangan (*air lines*), kantor promosi daerah tujuan wisata tertentu, dan sebagainya.

2. Sektor Perhubungan (*The Carrier Sector*)

Mencakup semua bentuk dan macam transportasi publik, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal wisatawan (*traveller generating region*) dengan tempat tujuan wisatawan (*tourist destination region*). Misalnya, perusahaan penerbangan (*airlines*), bus (*coachline*), penyewaan mobil, kereta api, dan sebagainya.

3. Sektor Akomodasi (*The Accommodation Sector*)

Sebagai penyedia tempat tinggal sementara/penginapan dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*). Sektor ini umumnya berada di daerah tujuan wisata dan tempat transit.

4. Sektor Daya Tarik/ Atraksi Wisata (*The Attraction Sector*)

Sektor ini terfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi wisatawan. Lokasi utamanya terutama pada daerah tujuan wisata tetapi dalam beberapa kasus juga terletak pada daerah transit. Misalnya, taman budaya, hiburan (*entertainment*), even olah raga dan budaya, tempat dan daya tarik wisata alam, peninggalan budaya, dan sebagainya. Jika suatu daerah tujuan wisata tidak memiliki sumber daya atau daya tarik wisata alam yang menarik, biasanya akan dikompensasi dengan memaksimalkan daya tarik atraksi wisata lain.

5. Sektor Tour Operator (*The Tour Operator Sector*)

Mencakup perusahaan penyelenggara dan penyedia paket wisata. Perusahaan ini membuat dan mendesain paket perjalanan dengan memilih dua atau lebih komponen (baik tempat, paket, atraksi wisata) dan memasarkannya sebagai sebuah unit dalam tingkat harga tertentu yang menyembunyikan harga dan biaya masing-masing komponen dalam paketnya.

6. Sektor Pendukung/ Rupa-Rupa (*The Miscellaneous Sector*)

Sektor ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di negara/ tempat asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun di negara/ tempat tujuan wisata. Misalnya, toko oleh-oleh (*souvenir*) atau toko bebas bea (*duty free shops*), restoran, asuransi perjalanan wisata, travel cek (*traveller cheque*), bank dengan kartu kredit, dan sebagainya.

7. Sektor Pengkoordinasi/ Regulator (*The Coordinating Sector*)

Mencakup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata.

1.5.3.2 Pengembangan Pariwisata

Menurut Happy Marpaung (2002: 19), pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang layak bagi warga yang tinggal disekitar objek wisata melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya mampu menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya pariwisata dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata.

Menurut Kementerian Pariwisata dalam Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan pembangunan pariwisata yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional.
- b. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya.
- c. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal.
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Sedangkan menurut Pitana (2005: 56), pengembangan pariwisata merupakan kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu diperbaiki dengan cara memelihara yang sudah berkembang ataupun menciptakan yang baru. Dengan kata lain bahwa pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan

menggunakan berbagai sumber daya lain diluar pariwisata itu sendiri guna menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata.

Lebih lanjut Suwanto (1997: 55) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap. Dalam pengembangan pariwisata yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan yang multidisipliner. Menurut Suwanto peran pemerintah sangat diperlukan sebagai pelaku sekaligus fasilitator dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan serta dengan mengoptimalkan keberadaan *stakeholders* yang terlibat dalam sektor ini (1997: 59).

Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Dari instruksi presiden tersebut juga menjelaskan jika pengembangan pariwisata Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan, serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
- b) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c) Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Dalam pengembangan pariwisata didalamnya tidak hanya mencakup pembangunan fisik suatu objek wisata sebagai daya tarik saja melainkan lebih jauh yang menjadi titik perhatian adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial budaya dan kelestarian lingkungan serta sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga dengan adanya pengembangan pariwisata dapat memberikan kesejahteraan

bagi masyarakat dengan tidak menghilangkan karakter dan budaya dari destinasi wisata tersebut.

1.5.3.3 Unsur Pengembangan Pariwisata

Gamal Suwanto dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Pariwisata (1997: 19-23), terdapat unsur pokok yang harus mendapat perhatian untuk memaksimalkan pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata sebagai berikut:

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.
- d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan.
- e. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan, dan lain-lain).
- f. Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

2. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Pembangunan prasarana pariwisata mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatnya aksesibilitas suatu obyek wisata.

3. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan didaerah tujuan wisata seperti hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

4. Tata Laksana/Infrastruktur

Merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik berupa sistem pengaturan fisik diatas permukaan tanah maupun dibawah tanah seperti contoh sistem pengairan, sumber aliran listrik dan jalur moda transportasi.

5. Masyarakat/Lingkungan

Masyarakat disekitar obyek wisata perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Disini peran pemerintah penting guna memberikan penyuluhan terhadap masyarakat akan sadar wisata. Dengan terbinanya masyarakat akan memberikan dampak positif berupa keuntungan dari uang yang dibelanjakan oleh wisatawan. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan juga diperlukan untuk dapat menjaga keberlangsungan tempat pariwisata tersebut. Dari sisi budaya, lingkungan masyarakatdalam lingkungan alam di suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup masyarakat oleh karena itu juga perlu dijaga kelestarian dan kualitasnya bersama-sama.

Teori pengembangan pariwisata lainnya dikemukakan oleh Cooper (1993: 84-86), ia berpendapat bahwa dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata terdapat empat unsur meliputi *attraction*, *amenities*, *access*, *ancillary services* yang disingkat dengan formulasi 4A sebagai berikut:

1) *Attractions*

Attractions adalah hasil dari buatan manusia, keindahan alam ataupun event yang menjadi motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Pada umumnya

atraksi terpisah dari industri pariwisata berdasarkan kepemilikannya. Untuk pengembangan pariwisata di masa depan akan dibutuhkan ahli khusus untuk mengelola atraksi (*management of attractions*).

2) *Amenities*

Amenities adalah pendukung pariwisata berupa fasilitas dan layanan dalam suatu destinasi. Hal ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya. Contohnya jumlah kamar di hotel akan dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke hotel tersebut. Adapun bentuk dari amenitas seperti akomodasi, *food and beverage service*, retail dan jasa lainnya.

3) *Access*

Access adalah suatu sistem untuk mengefisienkan transportasi mulai dari akomodasi menuju atraksi dan sebaliknya. Sistem tersebut dapat berupa jalur bersepeda, bus, dan transport lainnya.

4) *Ancillary Services*

Ancillary services melingkupi pemasaran, pengembangan dan koordinir aktivitas wisata. Organisasi ini dapat berupa organisasi publik/pemerintah dan swasta. Beberapa organisasi dapat mencakup regional ataupun nasional.

Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi destinasi wisata di kecamatan trowulan beserta potensi yang dimiliki kaitannya dalam pengembangan pariwisata. Kemudian diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pariwisata.

1.5.4 Dampak Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri pariwisata yang belakangan ini semakin berkembang kehadirannya. Dari kondisi tersebut tentunya pariwisata dapat memberikan pengaruh atau dampak bawaan akibat adanya wisatawan yang datang ke suatu wilayah tertentu dengan kondisi yang berbeda dengan dari tempat asal wisatawan. pengaruh yang diberikan dapat berupa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Baik secara

sosial budaya maupun ekonomi. Menurut Soemarjan (1975: 57), mengatakan bahwa secara konseptual perubahan-perubahan yang terjadi merupakan akibat munculnya proses akulturasi antara kebudayaan masyarakat sekitar obyek wisata dengan kebudayaan luar yang dibawa para wisatawan yang berkunjung. Sehingga dari proses inilah terdapat dua sudut pandang dalam melakukan penilaian menurut lingkungan sosialnya.

1.5.4.1 Dampak Sosial Budaya Masyarakat

Menurut Richardson dan Fluker (2004: 129-131), menyebutkan dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di daerah sekitar objek wisata antara lain:

a. Dampak Terhadap Struktur Populasi Masyarakat

Meningkatnya kegiatan kepariwisataan di suatu daerah objek wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sebagian dari mereka mungkin berasal dari penduduk lokal yang memutuskan untuk ganti pekerjaan dari sektor lain ke sektor pariwisata. Sebagian dari penduduk lain mungkin saja memutuskan untuk tetap bertahan tinggal disekitar daerah tersebut walaupun tidak terserap menjadi tenaga kerja sektor pariwisata disbanding harus pindah ke tempat lain karena keterbatasan peluang kerja. Kemungkinan lainnya adalah datangnya penduduk yang berasal dari daerah lain yang kebetulan bekerja didaerah tersebut karena pariwisata.

b. Transformasi Struktur Mata Pencaharian

Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini akan menarik minat orang dari lain pekerjaan dan wilayah untuk merapat ke sektor pariwisata. Beberapa daerah yang umumnya sumber mata pencaharian sebagian besar berasal dari sektor pertanian segera mengalami tantangan. Terjadi transformasi pekerjaan dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke pariwisata. Sifat pariwisata yang musiman kadang

mempengaruhi secara sosial masyarakat lokal yang juga bekerja di sektor pariwisata.

c. Transformasi Tata Nilai

Meningkatnya populasi dengan datangnya orang yang mempunyai *attitude* berbeda-beda dapat menyebabkan percampuran tata nilai pada daerah tujuan wisata tersebut. Dampak pariwisata pada tata nilai di daerah tujuan wisata lebih besar disebabkan karena pengaruh dari wisatawan yang datang dari daerah lain.

Dampak sosial budaya lainnya menurut Cohen dalam Yoeti (2008: 164) terbagi dalam sepuluh kelompok yakni:

1. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungan.
2. Dampak terhadap hubungan intrerpersonal antara anggota masyarakat.
3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial.
4. Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata.
5. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat.
6. Dampak terhadap pola pembagian kerja.
7. Dampak terhadap sertifikasi dan mobilitas sosial.
8. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan.
9. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial, dan
10. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Menurut World Tourism Organization dalam Yoeti (2008 :167) mengatakan bahwa pengaruh pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya dapat dibedakan menjadi 3 yakni:

1). *Polarization Of The Population*

Penduduk setempat sudah terpolarisasi. Perolehan pendapatan masyarakat tidak proporsional, kebanyakan penduduk ingin menjadi kaya secara mendadak, dan berusaha memburu dolar dengan jalan pintas, tanpa memiliki ketrampilan yang berarti.

2). *Breakdown Of The Family*

Yang dimaksudkan dengan ini adalah dengan masuknya wisatawan asing yang silih berganti dan terjadinya intensitas pergaulan antara yang melayani dan yang diberikan pelayanan, timbul akses negatif demi memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Pria asing mencari wanita setempat dan pemuda setempat menawarkan diri sebagai gigolo. Akibat lebih jauh dapat banyak terjadi perceraian di DTW tersebut.

3). *Development Of The Attitudes Of A Consumption-Oriented Society*

Sebagai akibat berkembangnya pengaruh masyarakat yang berorientasi konsumsi dan pengaruh penyakit masyarakat. Namun dalam sisi positifnya dapat di lihat dari kesempatan kerja, modernisasi keluarga, dan peningkatan wawasan dalam masyarakat.

Dari beberapa dampak pengembangan pariwisata terhadap sosial budaya masyarakat diatas, peneliti disini menitikberatkan pada dampak yang di kemukakan oleh Richardson dan Fluker yakni dampak pada terhadap struktur populasi, mata pencaharian, dan transformasi tatanan nilai.

1.5.4.2 Dampak Ekonomi Masyarakat

Menurut Yoeti (2008:20-21) dampak positif dari sudut pandang ekonomi makro dari kegiatan pariwisata menimbulkan dampak positif, diantaranya adalah:

1. Wisatawan yang berkunjung memerlukan pelayanan, dari adanya kebutuhan (*need*), dapat memberikan kesempatan berusaha. Dengan adanya keinginan (*want*) dari wisatawan, dan harapan (*expectation*) wisatawan yang berasal dari berbagai negara dan pola tingkah lakunya.
2. Meningkatkan penyerapan kesempatan kerja (*employment*).
3. Meningkatkan pendapatan serta mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai akibat dari adanya (*multiplier effect*) dari pengeluaran wisatawan relatif cukup besar dari adanya kunjungannya.

Sedangkan menurut Soekadijo dampak positif yang timbul terhadap lingkungan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata terhadap perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja dan berusaha. Aspek yang mendapat perhatian paling besar adalah aspek ekonomi. Dalam skala nasional, pengembangan pariwisata akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu dua yaitu :

1). Pengaruh yang ditimbulkan secara langsung, meliputi :

- a. Kegiatan industri pariwisata mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong munculnya berbagai lapangan kerja dan usaha yang menunjang kegiatan pariwisata.
- b. Meningkatkan perkembangan suatu daerah, karena pada umumnya daerah wisata terletak di pantai, gunung gunung dan daerah daerah terpencil yang mempunyai keindahan alam yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang dan meluas ke daerah tersebut.

2). Pengaruh tak langsung yang ditimbulkan oleh pengembangan pariwisata:

a) Dampak Penggandaan (*Multiplier Effect*)

Sejumlah uang yang diterima dalam masyarakat akan menimbulkan beberapa transaksi yang jumlahnya tergantung pada kondisi ekonomi.

b) Memajukan pasaran produk tertentu karena pariwisata merupakan daya konsumtif yang dinamis yang dapat mendorong konsumsi produk produk tersebut.

c) Penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak langsung maupun retribusi dari karcis tanda masuk dan parkir kendaraan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dampak pengembangan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Yoeti yang mencakup 3 hal yakni penyerapan tenaga kerja baru, peningkatan usaha baru dan peningkatan serta pemerataan pendapatan masyarakat.

1.5.5 Program Rumah Majapahit

Pada dasarnya program Rumah Majapahit dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Majapahit kepada Pemerintah Desa Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit dengan tujuan Melestarikan kawasan Majapahit di Trowulan dan memberikan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan Kawasan Taman Mojopahit.

Pembangunan Rumah Majapahit merupakan salah satu program pengelolaan kekayaan budaya yang melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya kegiatan pelaksanaan Rumah Majapahit menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan. Bentuk perwujudan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyaluran bantuan keuangan khusus kepada masyarakat dan dirancang untuk memberikan identitas Rumah Majapahit serta sebagai promosi potensi pariwisata daerah. Penggunaan dana bantuan keuangan khusus diprioritaskan pada kegiatan kolektif dan langsung menyentuh masyarakat.

Program Rumah Majapahit ini digulirkan pada masyarakat yang memiliki rumah berdekatan atau mengarah ke situs peninggalan Majapahit. Tidak semua rumah warga mendapatkan program ini melainkan hanya warga yang bersedia untuk dibangun Rumah Majapahit dengan dibuktikan melalui surat pernyataan kesediaan pemilik rumah. Sasaran program ini berada di enam desa yakni Desa Bejijong, Desa Jatipasar, Desa Sentonorejo, Desa Trowulan, Desa Wates sumpak, dan Desa Temon yangmana desa-desa tersebut terletak di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Dengan adanya program Rumah Majapahit diharapkan berdampak besar bagi perkembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, khususnya pada desa-desa yang menerima program ini. Keberadaan desa-desa tersebut akan

menjadi barometer kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya mampu membantu perekonomian masyarakat setempat dengan sendirinya berkembang melalui adanya usaha kreatif.

I.6 Definisi Konsep

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan di atas, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan

Adalah merupakan tahap akhir dari suatu tahapan kebijakan yang menyangkut penilaian suatu kebijakan dengan tujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan apakah sudah sesuai dengan pedoman guna meningkatkan kinerja kebijakan, melihat penyebab kegagalan/keberhasilan dari suatu kebijakan, dan untuk mengetahui dampak yang diberikan setelah adanya kebijakan tersebut selesai diimplementasikan. Evaluasi kebijakan disini ditujukan pada evaluasi Rumah Majapahit yang sudah berjalan dari tahun 2014 dimana dalam kondisi *existing*-nya masih ditemukan beberapa kendala dalam memaksimalkan pelaksanaan program tersebut.

2. Pengembangan Pariwisata

Merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh obyek wisata baik dengan melakukan pembangunan fisik maupun non fisik yang bertujuan sebagai meningkatkan daya tarik agar wisatawan mau berkunjung.

3. Dampak Pengembangan Pariwisata

Merupakan pengaruh yang diberikan terhadap wisatawan yang datang dari daerah asal ke daerah tujuan wisata yang dapat mempengaruhi sistem tananan sosial budaya dan ekonomi serta lingkungan masyarakat di sekitar daerah tujuan wwisata baik secara positif maupun negatif.

4. Program Rumah Majapahit

Adalah wujud pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran bantuan keuangan khusus yang dimaksudkan untuk mengganti bangunan baru rumah penduduk yang sudah ada pada bagian depan yang dirancang menyerupai suasana Rumah Majapahit sebagai promosi potensi pariwisata daerah. Bentuk pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang berkesinambungan dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam program Rumah Majapahit ini. Kegiatan yang berkesinambungan dimaksudkan setelah tahap pembangunan fisik rumah selesai kemudian diikuti dengan tahapan lain yakni pemanfaatan Rumah Majapahit untuk menunjang kegiatan industri pariwisata di Kecamatan Trowulan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam kerangka kerja penelitian. Melalui metode penelitian inilah yang menjadi usaha bagi peneliti dalam menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian bersifat spesifik, berkaitan dengan strategi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2014: 24).

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014: 4) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna baik dari individu-individu maupun kelompok yang dianggap bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam pendekatan kualitatif, analisis data bersifat induktif yang selanjutnya dilakukan penafsiran dari data-data yang ada sehingga dapat memberikan makna tertentu.

Sedangkan menurut Neuman (2006: 157) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah:

“Qualitative researchers use a language of case and contexts, employ bricolage, examine social processes and case in their social context, and

look at interpretations or the creation of meaning in specific settings. They look at social life from multiple points of view and explain how people construct identities. Only rarely do they use variable or test hypotheses, or convert social life into numbers.”

Berdasarkan pendapat Neuman di atas, penelitian kualitatif berfokus pada definisi makna subyektif, metafora, simbol dan deskripsi kasus tertentu. Penelitian kualitatif menggunakan lebih banyak logika dalam praktek dan bergantung pada kebijaksanaan informal yang telah dikembangkan dari pengalaman penelitian.

Untuk tipe penelitian, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi perbedaan sifat dan karakteristik dari kelompok manusia, benda, dan peristiwa. Setiap peristiwa atau fenomena memiliki potensi untuk dijadikan sebagai isu-isu yang dapat dipelajari guna memberikan pemahaman kepada peneliti terhadap permasalahan yang lebih luas mengenai apa yang dikaji (Danim, 2002: 61). Sedangkan menurut Moleong (2007: 3), tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang menyajikan satu gambaran terperinci mengenai suatu fenomena serta penelitian deskriptif bisa digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan.

Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai evaluasi pelaksanaan program Rumah Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Serta mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya program tersebut baik dari sisi lingkungan sosial budaya maupun sosial ekonomi masyarakat.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdapat di 7 lokasi yang berbeda yakni:

1. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagai dinas yang menaungi pelaksanaan program Rumah Majapahit serta penjembutan antara Pemerintah Desa dan Pemenintah Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagai Dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan secara fisik Rumah Majapahit.
3. Desa Bejjong sebagai desa sasaran pelaksana program Rumah Majapahit
4. Desa Trowulan sebagai desa sasaran pelaksana program Rumah Majapahit
5. Desa Jatipasar sebagai desa sasaran pelaksana program Rumah Majapahit
6. Desa Sentonorejo sebagai desa sasaran pelaksana program Rumah Majapahit
7. Des Wates Sumpak sebagai desa sasaran pelaksana program Rumah Majapahit
8. Desa Temon sebagai desa sasaran pelaksana program Rumah Majapahit

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini informan ditetapkan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Pada teknik ini penentuan informan dilakukan sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian. Dimana informan yang dituju dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program Rumah Majapahit serta dampak yang dirasakan dari program tersebut. Yang mendasari pemilihan teknik ini adalah dengan pertimbangan ketepatan sumber informasi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pemahaman informan mengenai permasalahan yang ada dalam program Rumah Majapahit. Informan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Kabid Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Mojokerto
2. Staff Administrasi Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto
3. Kaur Kesra Desa Bejjong
4. Kepala Dusun Desa Trowulan
5. Kaur Kesra Desa Sentonorejo
6. Kaur Keuangan Desa Wates Sumpak
7. Kepala Dusun Desa Temon

8. Kaur Kesra Desa Jatipasar
9. Bapak Agung penerima program Rumah Majapahit
10. Bapak Marsudi penerima program Rumah Majapahit
11. Ibu Romadhona penerima program Rumah Majapahit
12. Bapak Muksin penerima program Rumah Majapahit
13. Ibu Yati penerima program Rumah Majapahit

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data menjadi elemen yang penting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh itulah peneliti mampu untuk menganalisa dan menginterpretasi data penelitian sehingga dapat menjawab rumusan penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Menurut Creswell (2014: 267-270) teknik pengumpulan data dibagi ke dalam 4 jenis yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan terstruktur maupun semistruktur (dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti). Peneliti juga dapat terlibat dalam peran sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.

Peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta Kecamatan Trowulan sebagai lokasi pelaksanaan program Rumah Majapahit. Melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang sesuai baik dalam bentuk jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti maupun berupa aktivitas langsung yang ditemui di lokasi pelaksanaan program Rumah Majapahit untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam memperkuat data hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan *face to face* (berhadap-hadapan) dengan informan, lewat telepon, atau dalam bentuk *focus group interview* (dalam kelompok tertentu). Wawancara seperti ini biasanya menggunakan pertanyaan yang bersifat umum, tidak terstruktur, bersifat terbuka yang dirancang untuk dapat memunculkan pandangan dan opini dari orang yang diwawancarai.

Wawancara secara mendalam dalam penelitian ini dilakukan pada pihak yang memiliki kewenangan ataupun yang terlibat dalam program Rumah Majapahit. Pihak yang berwenang yang dimaksudkan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pihak lain yang terlibat dalam program ini tentunya adalah pihak Pemerintah Desa dan masyarakat sasaran pelaksanaan program Rumah Majapahit

3. Dokumen-dokumen

Dalam penelitian kualitatif dokumen yang dapat berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diari, surat, email). Dokumen-dokumen yang dikumpulkan harus relevan dan mampu untuk menjelaskan serta mengungkapkan fenomena yang ada dalam penelitian.

Dokumen secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen resmi seperti surat keputusan dan surat instruksi. Sedangkan dokumen tidak resmi seperti nota dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap peristiwa atau isu yang sedang dikaji (Satori, 2010: 149).

Studi dokumen dalam penelitian ini menyangkut dokumen berupa surat keputusan, laporan kegiatan, dan foto serta dokumen lain yang berhubungan dengan program Rumah Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan diperkuat sumber-sumber lainnya yang relevan untuk dikaji dalam penelitian.

4. Materi Audio dan Visual

Dalam materi audio dan visual data dapat berupa foto, objek-objek seni, atau segala jenis suara/bunyi. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan yakni berupa foto kegiatan pembangunan rumah Majapahit, foto sosialisasi kepada kelompok sasaran dan sejenisnya yang berkaitan dengan evaluasi program Rumah Majapahit.

1.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang peneliti lakukan konsisten dan reliabel. Menurut Gibbs (2007) dalam Creswell (2014: 285) bahwa validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain.

Strategi validitas yang dapat digunakan dalam uji keabsahan data menurut Creswell (2014: 286-288) yaitu:

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian.
5. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi penelitian.
7. Melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor untuk *mereview* keseluruhan proyek penelitian.

Sedangkan strategi validitas lain juga dapat dilakukan dalam pemeriksaan data adalah dengan teknik triangulasi yang mempunyai cara dan waktu yang berbeda. Menurut Satori dan Komariah (2010: 170-171) triangulasi dibedakan menjadi sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.

2) Triangulasi Teknik

Merupakan penggunaan beragam teknik pengambilan data yang dilakukan kepada sumber data. Pengecekan dilakukan terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Pengecekan konsistensi, kedalaman, dan kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji keabsahan data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengacu pada uji keabsahan menurut Creswell yang telah dipaparkan sebelumnya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap data. Data dianalisis dalam bentuk laporan lapangan. Dari laporan lapangan tersebut dapat mengungkapkan data apa saja yang perlu dikumpulkan, pertanyaan apa yang harus dijawab, persiapan dalam mencari informasi baru, dan kesalahan apa yang bisa diperbaiki. Sehingga analisis begitu erat dengan pengumpulan data. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan dianalisis informasi dari partisipan (Creswell, 2014: 275).

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis Miles dkk dimana analisis dilakukan melalui 3 tahapan yaitu *Data Condensation, Data Display, Drawing and Verifying Conclusion* (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: Chap. 1). Berikut penjelasannya:

1. *Data Condensation*

Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang telah didapatkan dari catatan lapangan atau berupa transkrip. Kondensasi data juga dapat dimaknai sebagai kegiatan memilih, memfokuskan, menyederhanakan,

abstraksi, atau mengubah data yang muncul secara keseluruhan dalam catatan lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen, dan materi empiris lainnya. Kondensasi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Kondensasi data meliputi penulisan ringkasan atau uraian singkat, mengklasifikasi data, pengkodean, pengembangan tema, dan menulis memo analisis.

2. *Data Display*

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yakni penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berupa grafik, matrik, dan bagan. Dari penyajian data tersebut seorang peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan kemudian menarik kesimpulan.

3. *Drawing and Verifying Conclusion*

Proses analisis data yang terakhir dilakukan adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada berdasar pada temuan data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.